

AKTIVITAS GEMENTEE SURABAYA TAHUN 1906-1942

Widi Sudarmawan¹⁾
Purnawan Basundoro²⁾

Abstrak

Sejarah Kota Surabaya pada zaman kolonial Hindia Belanda memasuki abad ke-20, pada dasarnya juga mengungkapkan perkembangan kota Surabaya menuju perubahan dari kota tradisional menjadi kota modern. Namun perlu disadari bahwa perkembangan kota yang modern ini membutuhkan struktur dan sarana penunjang sebagai acuan untuk modernisasi sebuah kota pada khususnya kota Surabaya. Dibentuknya Gemeente Surabaya merupakan bentuk dari pelimpahan kekuasaan dalam pemerintahan daerah di Surabaya yang disahkan tanggal 1 April 1906. Untuk menunjang segala aktivitas yang terjadi di Gemeente Surabaya perlu ada pembiayaan untuk menjalankan segala aspek yang ada di Gemeente Surabaya, dalam hal ini pemerintah pusat memberikan modal awal pada Gemeente Surabaya sebesar f284.300. Permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini adalah aktivitas Gemeente Surabaya dalam memajukan aspek pembangunan kota, perekonomian, dan kesejahteraan masyarakat, dengan membentuk dinas-dinas urusan kota yang sudah ditetapkan dalam dinas urusan pekerjaan umum Gemeente Surabaya.

Kata Kunci: Gemeente, Surabaya, Aktivitas, Dinas.

Abstract

The history of Surabaya the colonial Dutch-East Indies in the beginning of 20th centuries basically uncovered the development of Surabaya from traditional city to modern city. However, we have to realize that the development of modern city needs structure and support facilities as a reference to modernize a city, especially Surabaya. The establishment of Gemeente in Surabaya is a form of Surabaya local government's power devolution which is authorized in April 1st 1906. It requires funds to provide any activities from any aspects of gemeentee Surabaya. In this case, central government gave Surabaya f284.300 for Gemeente in Surabaya as the initial capital. This study examines Gemeentee activities in Surabaya in advancing the development aspects of the city, the economy, and public welfare by establishing municipal affairs departments that have been set forth in the public works department affairs of Gemeentee Surabaya.

Keywords: Gemeentee, Surabaya, activities, official.

1) Mahasiswa Jurusan Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga, email widisudarmawan@yahoo.co.id

2) Dosen Jurusan Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga

Pendahuluan

Pada tahun 1906, sesuai dasar hukum yang diambil dari instelling *Ordonnantie Staatblad* No.149/ 1906 tertanggal 1 April 1906. Penetapan ini menjadikan Surabaya menjadi kota yang otonom. Pemberian status ini juga menampakan eksistensi kota Surabaya yang mengalami kemajuan dan perkembangannya dan menjadi salah satu kota terbesar di Hindia Belanda.

Untuk menunjang biaya operasional *Gemeente* Surabaya pemerintah pusat hanya memberikan dana sebagai modal awal tersebut sebesar f 284.300. Oleh karena itu pemerintah harus bisa mencari sumber dana lain agar bisa menjalankan penunjang operasional *Gemeente* Surabaya (Purnawan Basundoro,2012: 10).pada masa-masa sebelumnya pendapatan pajak daerah *Gemeente* Surabaya pada tahun 1905-1906 hanya berasal dari penjualan air dan dari pajak pemakaman.

Beberapa hal yang tidak boleh dibebankan pada anggaran pemerintah pusat tersebut antara lain pemeliharaan, perbaikan dan pembangunan jalan umum, alun-alun, taman kota, tanggul sungai, selokan, rambu lalu-lintas, jembatan, gorong-gorong, saluran air, pemandian umum, kakus, rumah potong hewan dan gudang pasar.

Asisten Residen W.F. Lutter merupakan Ketua Dewan pertama yang merangkap sebagai pimpinan awal *Gemeente* Surabaya sebelum *Burgemeester* dibentuk, dalam rapat pertama tanggal 9 April memberitahukan bahwa sumber keuangan *Gemeente* yang masih baru saja terbentuk itu sangat sedikit jumlahnya, sehingga dengan dana yang terbatas itu kebutuhan-kebutuhan operasional di *Gemeente* Surabaya tidak akan bisa terpenuhi sepenuhnya dan oleh karena itu, ini akan jadi masalah yang perlu dibenahi. Pertama, terdapat desakan kapada pemerintah pusat untuk

memberi lebih banyak dana untuk *Gemeente* Surabaya, Kedua, *gemeente* harus segera mencari sumber pemasukan dari dalam *gemeente* dan ketiga, tidak lain daripada melakukan pengeluaran pembelanjaan setinggi mungkin sebagai penunjang seluruh operasional *gemeente*(F.W.M. Kerchman, 1930: 349).

Jika berkenaan dengan point kedua, maka banyak usaha yang dilakukan untuk dapat mendatangkan uang sebanyak mungkin. Sehingga Dewan memutuskan untuk mengadakan *verpachting* atau lelang terbuka untuk hak memasang papan iklan, sementara usaha yang lain diawali dengan menyewakan tanah *Gemeente* pada tahun 1908 dapat menghasilkan total f.4000(F.W.M. Kerchman, 1930: 350).

Pada tanggal 5 Maret 1912, ketua dewan Waleson meninggal dunia. Dalam rapat pertama setelah meninggalnya Waleson, kemudian dia digantikan oleh Tuan G.Th. Stibbe, yang pada bulan Oktober tahun yang sama digantikan oleh L.J.Schippers, seorang kontrolir yang pada tanggal 24 Desember diangkat menjadi kepala pemerintahan lokal. Tuan Schipper memimpin dewan hingga tanggal 21 Agustus 1916(F.W.M. Kerchman, 1930: 352). *Gemeente* Surabaya yang semestinya dipimpin oleh seorang *burgemeester* atau walikota baru mendapat kebijakan dengan mengangkat walikota pada tahun 1916 atau sekitar sepuluh tahun sejak *Gemeente* Surabaya berdiri (Purnawan Basundoro, 2012: 19).

Dengan demikian pertumbuhan *gemeente* yang cepat, unit usaha yang dijalankan telah menghasilkan keuntungan, kemudian dimasukkan ke dalam manajemen *Gemente*. Unit usaha yang dikerjakan *Gemeente* Surabaya sudah dijelaskan di atas hal ini diperlukan untuk memenuhi biaya operasional *gemeente* yang semakin besar

Pasar (Pasarbedrijf)

Dinas pasar *Gemeente* berdiri pada tahun 1915. Keadaan di dalam pasar ketika masih menjadi pasar yang berdiri diatas tanah partikelir sedemikian rupa sehingga demi kepentingan penduduk, perlu dilakukan perbaikan. Jika pada awal pendiriannya hanya ada 2 pasar, maka dalam beberapa bulan jumlah itu telah bertambah menjadi 6 pasar (Neyndorff, 1915:49).

Secara berangsur-angsur, pasar baru berdiri atau mengambil alih pasar partikulir yang telah ada (sebelumnya). Sekarang, dinas pasar telah mengelola 19 pasar (Neyndorff, 1915: 55). Pasar terbaru seperti pasar Wonokromo dan Turi telah memenuhi standar kesehatan. Keduanya memiliki konstruksi yang memudahkan pembersihan dan memiliki los daging dan ikan yang tersendiri. Pasar Turi yang masih belum berumur 1 tahun telah ramai dipadati pengunjung, dimana sekarang harus diperluas lagi. Jadi tidak mengherankan jika dalam kondisi seperti ini, jumlah pasar partikulir semakin berkurang. Jumlah pasar partikelir di Surabaya yang masih tersisa diawasi dengan ketat baik dari kelembagaan maupun tarifnya (F.W.M. Kerchman, 1930: 364).

Pengembangan Pemukiman

Pertambahan penduduk di Karesidenan Surabaya seiring dengan lajunya urbanisasi dan migrasi. Semenjak dikeluarkan UUPA Undang-undang Pokok Agraria yang disebut juga sebagai *Agrarische Wet* pada tahun 1870 terjadi perluasan pabrik gula di wilayah itu yang mengakibatkan urbanisasi dan migrasi meningkat, sehingga penduduk juga semakin padat. Kepadatan penduduk terjadi di sekitar pabrik-pabrik gula yang kemudian berpengaruh terhadap pola pemukiman (F.W.M. Kerchman, 1930: 356).

Sementara itu pemukiman di kota Surabaya yang semakin padat

penduduknya, menimbulkan suatu problem yang harus diselesaikan oleh pemerintah Hindia Belanda maupun pihak swasta. Untuk mengatasi kesulitan masalah pemukiman pada tahun 1906 Pemerintah Kota praja Surabaya membeli tanah seluas 130 ha di Gubeng Jepit untuk dikembangkan sebagai perumahan. Kemudian pada tahun 1916 membeli tanah seluas 138 ha di Ketabang Utara dan Selatan serta 550 ha di Ngagel yang lebih dikenal dengan nama Jagir.

Urbanisasi dan migrasi di wilayah Karesidenan Surabaya mengakibatkan peningkatan kepadatan penduduk, terutama di sekitar pabrik-pabrik gula yang kemudian berpengaruh terhadap pola pemukiman. Maka, timbullah “kampung-kampung” disekitar pabrik-pabrik gula yang padat dengan rumah-rumah penduduk pada daerah pedesaan. Berbeda dengan desa-desa sekitarnya, sebagian besar penduduk kampung-kampung itu tidak mempunyai sawah dan hanya bekerja dalam lingkungan pabrik. Dapat dikatakan, bahwa kampung-kampung dalam lingkungan pabrik mempunyai kekerabatan modern dalam sistem komunikasi, alat-alat transport dan bentuk arsitektur pabrik memberi corak baru dalam masyarakat desa (Sutjipto, 1970: 2).

Kemudian, masalah pemukiman di kota Surabaya yang semakin padat penduduknya menimbulkan suatu problem yang perlu diselesaikan oleh pihak pemerintah Hindia Belanda. Masalah pemukiman erat hubungannya dengan *real-estate* (Sutjipto, 1970: 5) yang sudah sejak lama berperan serta dalam pembangunan kota di Hindia Belanda.

Di dalam mengatasi kesulitan pemukiman Pemerintah kota praja Surabaya mempunyai peranan yang cukup penting. Pada tahun 1909 kota praja Surabaya membeli tanah di Gubeng Jepit seluas 130 hektar di

seberang sungai Simpang dengan tujuan untuk digunakan sebagai kuburan bagi orang Eropa. Untuk membantu mengatasi kekurangan perumahan segera diputuskan untuk mengembangkan bagian wilayah ini ke arah timur jalan kereta api yang dipergunakan sebagai pemukiman bagi masyarakat Eropa.

Pada akhir tahun 1916 kota praja Surabaya membeli lagi dua lokasi area tanah yang cukup luas, lokasi pertama seluas 138 hektar di Ketabang Utara dan Ketabang Selatan, depan Tunjungan di seberang Kali Mas. Lokasi ke dua seluas 550 hektar di Ngagel yang lebih dikenal dengan nama Jagir, juga terletak di seberang Kali Mas namun masih ke Selatan lagi.

Wilayah Ketabang Utara yang akan segera dirombak untuk lokasi perumahan orang-orang Eropa dan perkantoran kota praja dan sekolah tinggi Eropa. Pembuatan perumahan orang-orang Eropa ini turut menggeser penduduk pribumi yang semakin terdesak masuk ke area pedalaman atau pedesaan dalam. Penyediaan pemukiman baru ini juga mempunyai banyak agenda permasalahan yang akhirnya membebankan juga pada pemerintah daerah *Gemeente* Surabaya.

Pada tahun 1924, dibuat sebuah rancangan umum perbaikan sistem drainase dan riool kampung, yang diperkirakan akan menghabiskan biaya f 600.000 Untuk pelaksanaan kerja secara perlahan ini, setiap tahun akan dikucurkan dana sebesar f.100.000 yang berasal dari anggaran *Gemeente*, yang juga akan segera diproses (F.W.M. Kerchman, 1930: 356).

Dalam perancangan perbaikan tersebut khususnya terdiri atas kampung-kampung yang berada di bagian kota lama yang telah padat. Pada kampung-kampung di distrik-distrik yang baru, sejak dari awal sudah dalam kondisi yang bagus dan sudah disesuaikan dengan tuntutan dari

Gemeente Surabaya, meski belum mencapai kesempurnaan, sementara pada kampung-kampung yang berada di dekat batas *Gemeente* masih memiliki banyak ruang atau lahan kosong dan drainase yang bagus sehingga memiliki kondisi yang lebih menguntungkan jika dibandingkan dengan apa yang terjadi di kampung yang ada di distrik Eropa, Arab dan Cina (F.W.M. Kerchman, 1930: 356).

Dalam hal ini Penataan pemukiman yang berhubungan erat dengan masalah perumahan di Karesidenan Surabaya setelah bertambahnya urbanisasi dan migrasi mengalami peningkatan, hal ini menimbulkan masalah tersendiri bagi pemerintah Hindia Belanda (Suwarno, 1986: 56). Kota praja Surabaya memang mengambil langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah pemukiman. Namun di dalam pengembangan pemukiman, para buruh pabrik gula yang bertempat tinggal di kampung-kampung yang berada di sekitar pabrik gula dan daerah pedesaan kurang mendapat perhatian, sehingga mereka mengalami kesulitan untuk dapat tinggal di rumah yang layak huni. Mereka juga harus membayar mahal baik sewa, beli, maupun sewa-beli itu sendiri.

Kemudian pada Tahun 1923 terjadi proyek pembangunan perumahan di kota Surabaya, jelas bahwa fasilitas pembangunan itu diperuntukan bagi orang-orang Hindia Belanda, Eropa, China, dan orang-orang kaya lainnya (Heida, 1939: 49). Pengembangan pemukiman ini berdampak pada rakyat pribumi yang semakin terpinggirkan ke arah pedalaman atau pedesaan dengan kelayakan pemukiman yang tradisional jauh dari fasilitas yang diberikan oleh pemerintah kolonial yang lebih mementingkan penduduk luar bangsa Eropa dan Belanda khususnya.

Pembangunan Jalan Raya

Banyaknya sarana transportasi dalam masyarakat, membuat pemerintah memberlakukan pajak, tak terkecuali pada kereta kuda. Pajak ini ditarik untuk menambah biaya perbaikan jalan raya akibat seringnya dilewati oleh kereta kuda. Saat itu, kereta kuda juga menjadi alternatif transportasi yang banyak diminati oleh masyarakat, terutama kalangan menengah atas yang umumnya adalah orang Cina dan Jawa. Oleh karena itu, tambahan peraturannya juga dituliskan dalam bahasa Cina dan Jawa pada *Staatsblad* tahun 1853 No. 6.

Persetujuan dalam pembangunan dan pemeliharaan jalan raya dari pemerintahan militer dengan tata seni di *Staatsblad* tahun 1906 no 170, kegunaan pembangunan dan pemeliharaan tidak akan berjalan tanpa perintah langsung dari ketua Panglima Angkatan Darat atau ditunjuk oleh mereka otoritas pemerintahan setempat dan ditunjuk dari komandan militer divisi terkait. Rencananya jalan ini, bertujuan untuk menunjukkan pembangunan atau peningkatan jalan untuk keperluan lalu lintas, disampaikan oleh Direktur Pekerjaan Umum sejak publikasi laporan sebelumnya. Periode awal untuk pelaksanaan rencana ini dialokasikan untuk anggaran Hindia-Belanda, sementara kepala departemen dipercayakan kepada dewan daerah (*Decentralisatie-Verslag, 1912-1913: 120*). Perencanaan ini juga memberikan pekerjaan baru bagi pemerintah daerah dengan dibentuknya lembaga khusus yang diperuntukan keperluan kepentingan jalan dan perawatan berkala dan pengaspalan jalan yang membentang di kawasan operasional *Gemeente* Surabaya.

Pada tahun 1910 Pemerintahan Hindia Belanda di wilayah Surabaya melalui BOW (*Burgerlijke van Openbare Werken*) melakukan perbaikan jalan dan pengaspalan wilayah Surabaya. Perbaikan jalan

tersebut dilakukan karena adanya beban/lalulintas kendaraan yang bertambah sehingga membebani jalan dan mempercepat kerusakan jalan. Di samping itu juga dilakukan pemasangan kabel dari perusahaan listrik maupun telepon umum Hindia Belanda serta pemasangan pipa gas. Adapun jalan yang diaspal antara lain Jalan Pasar dan Gang Batoe, Embong Gayam, Embong Ploso, dan lain-lain (Rintoko, 2012: 127).

Berdasarkan keputusan Gubernur Jenderal Hindia Belanda No. 29 tanggal 15 Nopember 1910 disetujui anggaran penerimaan dan pengeluaran dari wilayah Surabaya untuk tahun 1911 berjumlah f 72.048 yang dikeluarkan untuk pemeliharaan jalan. Jumlah anggaran tersebut kemudian ditambah f 4.316 sehingga jumlahnya menjadi f 76.364. Selain itu juga dilaksanakan pula perbaikan jalan maupun jembatan sebagai sarana pendukung jalan raya yaitu jembatan Panjangdjiwo di jalan Goebeng - Kebon Agoeng, diperbaiki dengan biaya yang disetujui f 4.482 dengan dana yang dipergunakan f 4.257. Sedangkan Peraturan dari Dewan Daerah 20 Maret No. 2 yang disetujui f 2.710. Serta dilakukan pula pengaspalan jembatan di Jalan Kedoeroes - Bringkang dengan menelan dana f 2.100 (*Decentralisatie-Verslag, 1912-1913: 79*)

Sementara itu di Kota Soerabaya juga ada kegiatan pelebaran jembatan Goebeng dari 5,50 m dan trotoar 1,25 dan 1 m sesuai dengan Peraturan Dewan Kota tanggal 6 Oktober 1905 No. 240 dengan biaya f 870 dan menghabiskan f 845. Pengaspalan jalan pada akhir tahun 1909 total jalan yang beraspal 46.110 m dari panjang keseluruhan 46.100 m yang meliputi jalan Kramat Gantoeng, De Chinesche voorstraat, dan sekitarnya. Kemudian pada tahun 1913 sesuai dengan Keputusan Dewan Kota tanggal 15 Januari 1913 no. 532 dan no. 557 tanggal 26 Pebruari 1913.

BOW juga melakukan perbaikan perempatan jalan Maleische Voorstraat serta membersihkan got/selokan sepanjang jalan tersebut dengan menghabiskan anggaran kurang dari f 1.617. Jalan tambahan dengan anggaran f 2.976, biaya yang digunakan sebesar f 2.246.100 (Decentralisatie-Verslag, 1912-1913: 97).

Pada tahun 1923 pemerintah banyak mengeluarkan peraturan tentang pajak yang menyangkut pengaturan bis, kendaraan, pembayaran, barang, barang yang diangkut.

Pembangunan jalan di *Gemeente* Surabaya juga diimbangi dengan melakukan perbaikan dan perawatan jalan dan ditambah infrastruktur penunjang seperti penerangan jalan-jalan umum dan sudah tertulis juga pada St1906No. 172 mengenai pemberian pencahayaan disepanjang jalan umum. Dalam laporan lokal *Gemeente* Surabaya penerangan jalandiberikanolehHindia-Belanda Padaakhir tahun1912, jumlah lampuyang dibutuhkan pada tahun itusementara dianggarkan pada belanja daerah sebesarf63.901,47dan selain Selain biayaf25dikeluarkan untuk mengontrolintensitas cahaya perharinya(F.W.M. Kerchman, 1930: 358).

Rumah Potong hewan

Rumah potong milik *Gemeente* adalah salah satu bentuk pajak yang diterapkan oleh *Gemeente* Surabaya, yang sekarang ini mulai digunakan pada bulan Maret 1927. Sebelum tahun 1912, pemotongan di Surabaya dilakukan terpusat. Pada waktu itu, rumah potong berada di Kapasan dan hanya terdiri atas dua tempat besar yang terbuka, dan menurut pemahaman sekarang ini, perlu dikaji secara higienis. Rumah potong itu dimanfaatkan oleh swasta - yang selalu dibawah kontrol pemerintah, yang berkaitan dengan penyerahan pajak potong(F.W.M. Kerchman, 1930: 361).

Dinas Kebakaran Gemeente Surabaya

Dinas Pemadam Kebakaran pada masa kolonial yang disebut juga sebagai *de Brandweer*. Di Kota Surabaya *de Brandweer* didirikan pada tanggal 4 September 1810 melalui keputusan yang dikeluarkan oleh Gubernur Jendral Daendels. Dinas Kebakaran Kota Surabaya mempunyai andil cukup penting dalam pembangunan kota Surabaya yakni mengurangi kerusakan akibat dari bencana kebakaran. *De Brandweer* memiliki kendala keterbatasan sarana dan prasarana. Menanggapi hal tersebut modernisasi sarana dan prasarana dilakukan, yaitu pemeliharaan, perbaikan, renovasi, pembaharuan Dinas Kebakaran Kota Surabaya.

Modernisasi Dinas Kebakaran Kota Surabaya baru dirasakan secara signifikan pada tahun 1906 akibat dari penetapan kota Surabaya berstatus kotamayda atau *gemeente*. Modernisasi dilakukan mulai dari peralatan pemadam kebakaran,kepengurusan anggota *de Brandweer* hingga pemindahan depo kebakaran ke Pasar Turi baru pada tahun 1927. Modernisasi Dinas Kebakaran Kota Surabaya mendapatkan respon cukup baik darimasyarakat Surabaya, karena telah membantu masyarakat dalam mengatasi kebakaran lebih cepat dan efektif. Modernisasi Dinas Kebakaran Kota Surabaya mendapatkan respon cukup baik dari masyarakat Surabaya, karena telah membantu masyarakat dalam mengatasi kebakaran lebih cepat dan efektif.

Didirikannya *de Brandweer* turut serta membangun perkotaan Surabaya dengan cara mengurangi kerusakan yang diakibatkan oleh kebakaran. Berdasarkan reglement Surabaya tentang *Brandweer* dijelaskan pada pompa-pompa pemadam kebakaran lengkap dengan peralatannya ditempatkan di pusat kota dan diluar pusat kota. Sebanyak empat lokasi

penting yang berada di pusat kota dan empat lokasi penting juga di luar pusat kota yang akan ditempatkan pompa-pompa pemadam kebakaran (Von Faber, 1906: 98). Empat lokasi penting di pusat kota yaitu pusat penjagaan tentara, bengkel konstruksi tentara (*altellerie constructie winkel*), jembatan, dan disamping kediaman penguasa Jawa bagian Timur (Gezaghebber). Empat lokasi penting diluar pusat kota yaitu Passerbaan, di kampung China, kampung Melayu, dan di rumah sakit Simpang.

Untuk setiap pompa disiapkan sebanyak 40 orang pribumi untuk bertugas sebagai tukang genjot. Sebanyak 40 orang pribumi bekerja secara bergantian menggenjot tangkai pompa. Mengingat mesin pompa yang dipergunakan masih menggunakan tenaga manual, sehingga membutuhkan tenaga manusia untuk pengoperasiannya. Susunan petugas Dinas Kebakaran Kota Surabaya pada tahun 1810 terdiri dari 4 orang Brandspuitmeester (kepala Pemadam Kebakaran), 8 orang Onder Brandspuitmeester (wakil kepala pemadam kebakaran), 8 orang sersan, 8 orang koprak (Von Fober, 1906: 98).

Melihat peralatan yang masih sederhana di atas tersebut maka diperlukan peralatan yang lebih modern. Semenjak berdirinya Dinas Kebakaran Kota Surabaya tahun 1810 hingga tahun 1905 tidak mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah pusat di Batavia sehingga berimbas pada sarana dan prasarana masih sederhana.

Baru pada tahun 1906 Dinas Kebakaran Kota Surabaya baru dapat merasakan modernisasi sarana dan prasarana. Berdasarkan Staatsblad No. 149 tahun 1906 menjadikan alasan diberlakukannya modernisasi Dinas Kebakaran Kota Surabaya. Di dalam Staatsblad No. 149 tahun 1906 pasal 3 dijelaskan mengenai tugas pertama dewan kota Surabaya yakni pemeliharaan, perbaikan, renovasi dan

pembaharuan (Staatsblad van Nederlandsch-Indie No.149). Kemudian pada Staatsblad No. 149 tahun 1906 pasal 5 dijelaskan bahwasannya Dinas Kebakaran Kota Surabaya mempunyai tempat atau markas sementara terletak di daerah Simpang nomer 1-5 (Staatsblad van Nederlandsch-Indie No.149). Ini merupakan suatu hal yang baru bagi Dinas Kebakaran Kota Surabaya mengingat sebelum diberlakukannya desentralisasi, pemadam kebakaran masih belum mempunyai markas pemadam kebakaran.

Dipertegas pula dalam Staatsblad No.149 tahun 1906 pasal 6 segala keperluan mengenai pembiayaan dana dari Dinas Kebakaran Kota Surabaya mulai dari sarana dan prasarana ditanggung oleh pemerintah dewan kota Surabaya (Staatsblad van Nederlandsch-Indie No.149). Dalam pembiayaan perawatan juga dibutuhkan tahapan-tahapan dasar dalam pengoprasi-an alat-alat dinas kebakaran yang telah ditentukan oleh dewan kota Surabaya.

Pembiayaan mulai dari perbaikan sarana dan prasarana hingga pembelian peralatan baru untuk Dinas Kebakaran Kota Surabaya dibiayai oleh pemerintah Gemeente Surabaya. Semenjak tahun 1906 Dinas Kebakaran Kota Surabaya mengalami modernisasi sarana dan prasarana yaitu meliputi struktur organisasi, peremajaan hingga pengadaan peralatan baru, dan pemindahan depo kebakaran dari Pasar Besar ke Pasar Turi.

Staf pemadam kebakaran pada tahun 1915 yang berasal dari orang Eropa maupun orang pribumi berjumlah 1540 disebut sebagai anggota korps sukarelawan pemadam kebakaran. Jumlah anggota Dinas Kebakaran Kota Surabaya yang banyak tersebut dikarenakan peralatan pemadam kebakaran yang dimiliki masih terbilang sederhana seperti pompa manual. Korps sukarelawan tersebut bertugas

mengoperasikan peralatan pemadam kebakaran salah satunya yaitu alat pompa tersebut. Sudah dijelaskan sebelumnya pada setiap pompa sudah disiapkan kebakaran dengan menggunakan mesin pompa, sehingga kebakaran pun cepat dipadamkan (*Decentralisatie-Verslag, 1912-1913: 126*).

Selain melakukan pembelian mobil kebakaran, pemerintah kota Surabaya juga mempertimbangkan pembelian tangga mekanik untuk Dinas Kebakaran Kota Surabaya. Pembelian tangga mekanik telah memakan biaya sebesar *f* 15000 (*Decentralisatie-Verslag, 1912-1913: 126*).

Pengadaan tangga mekanik ini diperlukan, karena Dinas Kebakaran Kota Surabaya membutuhkan peralatan tersebut untuk menjangkau sumber api atau kebakaran yang terjadi di gedung-gedung tinggi. Seluruh peralatan yang dibutuhkan dinas pemadam merupakan sebagai bentuk perubahan mengarah ke arah praktis dan lebih efisien pada saat pengerjaan pemadaman api. Didirikannya Dinas Kebakaran Kota Surabaya merupakan salah satu sarana fasilitas kota yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat Surabaya.

Dikatakan sebagai fasilitas kota karena keberadaannya diperlukan untuk melayani masyarakat Surabaya yaitu menanggulangi bencana kebakaran lebih besar. Dikeluarkannya peraturan mengenai pemadam kebakaran tersebut sangat wajar apabila mendapat respon sangat antusias dari masyarakat kota Surabaya. Sebelum dikeluarkan peraturan tersebut ketika terjadi kebakaran maka penanganan musibah kebakaran tersebut masih sangat sederhana yaitu dengan menggunakan ember atau peralatan yang ditemukan di sekitar untuk memadamkan api (Von Fober, 1906: 106).

Penanganan yang sederhana ini sangat menyulitkan masyarakat

Surabaya untuk memadamkan kebakaran. Bentuk respon masyarakat Surabaya juga tertuang dalam bentuk partisipasi mereka dalam mengatasi musibah kebakaran. Bentuk partisipasi yang dilakukan oleh masyarakat salah satunya yaitu dengan melaporkan terjadi peristiwa musibah kebakaran kepada petugas pemadam kebakaran. Ini dapat membantu petugas Dinas Kebakaran Kota Surabaya dalam menemukan peristiwa musibah kebakaran lebih awal. Melihat partisipasi masyarakat tersebut maka akan diberikan bonus sebesar 5 *f* bagi masyarakat yang melaporkan terjadinya peristiwa kebakaran. (Von Fober, 1906: 246). Memberikan bonus kepada masyarakat dan petugas Dinas Kebakaran Kota Surabaya diharapkan dapat termotivasi untuk memadamkan peristiwa kebakaran di Surabaya.

Pemakaman Umum Di Surabaya

Pemakaman atau yang biasa disebut *Algeemene begraafplaatsen* pada masa kolonial merupakan bagian penting bagi pemerintahan kolonial di Surabaya. Makam tertua di Surabaya yang sudah ada sebelum Surabaya ditetapkan menjadi *Gemeente* merupakan makam Peneleh yang dibuka dan diresmikan pada tahun 1847 (Von Fober, 1906: 314). Hingga pada keputusan desentralisasi kota Surabaya yang tercantum dalam *staatblad* tahun 1906 No 149 peraturan ini memberikan arahan pada pemerintah kota Surabaya untuk mengedepankan pemakaman yang ada di Surabaya. selain wewenang yang diatur untuk pemisahan makam menurut warga yang ada di Surabaya. Peraturan ini tertuang dalam *staatblad* tahun 1906 no 160 yang mengatur tentang kebijakan pembagian wilayah makam atas garis keturunan warganya.

Dengan peraturan ini maka pemerintah kota membangun makam umum yang sudah disesuaikan kewarganeraanya. Untuk makam Eropa telah dibangun pemakaman Kembang

Kuning tahun 1942 (Von Fober, 1906: 186). Makam ini berada di sebelah Barat pemukiman baru orang-orang Eropa di daerah pinggiran Jl. Darmo. Dalam perkembangannya makam di Surabaya mengalami perubahan pada awal abad ke-20 pemerintah kota memberikan kebijakan dengan membangun pemakaman umum khusus warga pribumi. Pembangunan ini ke area pengaruh pertumbuhan masyarakat pribumi yang semakin pesat dan bertambahnya penduduk akibat urbanisasi. Makam yang telah disediakan oleh pemerintah kota yakni di wilayah Tambak Gede, Kapas Krampung, Karang Tembok, Ngagel dan Putat Gede. Pembangunan ini juga disesuaikan dengan pembagian distrik di bagian wilayah Surabaya.

Dalam pengelolaannya makam di Surabaya masih menggunakan jasa petugas orang yang menjaga makam atau sering disebut juru kunci makam. Pegawai petugas makam tersebut juga dipekerjakan dan diangkat menjadi pegawai dinas pemakaman *Gemeente* Surabaya dalam pelaksanaan tugasnya juru kunci makam juga membantu tugas pemakaman, membantu mempersiapkan makam, dan membantu jalannya upacara pemakaman yang sedang dilangsungkan pada suatu acara pemakaman.

Kesimpulan

Sebagai pelaksanaan dari undang-undang Desentralisasi tahun 1903, maka pada tanggal 1 April 1906 disahkan pemerintahan kota Surabaya yang otonom dan bernama *Gemeente* Surabaya. berdirinya *Gemeente* Surabaya ini disahkan melalui *Staatsblad* No.149 Tahun 1906. Pasal yang menyebutkan tentang perintah pembentukan itu dapat dilihat dari pasal 1 yang memerintahkan untuk membentuk sebuah kesatuan administratif baru di wilayah Residen Surabaya yang bernama *Gemeente* Surabaya yang wilayahnya meliputi

ibukota Residen Surabaya.

Dengan berdirinya kota yang otonom ini *Gemeente* Surabaya berkewajiban agar bisa berkewajiban dalam hal pengelolaan *Gemeente* Surabaya sendiri tanpa harus membebani kepentingan pemerintah pusat. Untuk memenuhi keuangan dan kepentingan khusus daerah *Gemeente* Surabaya, pemerintah pusat memberikan dana sebesar f 284.300. Untuk menunjang segala aktivitas *Gemeente* Surabaya, pemerintah membentuk dinas-dinas yang memberikan dampak dalam kemajuan finansial yang ada di Surabaya.

Pada masa-masa sebelumnya pendapatan pajak daerah *Gemeente* Surabaya pada tahun 1905-1906 hanya berasal dari penjualan air dan dari pajak pemakaman. Beberapa hal yang tidak boleh dibebankan pada anggaran pemerintah pusat tersebut antara lain pemeliharaan, perbaikan dan pembangunan jalan umum, alun-alun, taman kota, tanggul sungai, selokan, rambu lalu-lintas, jembatan, gorong-gorong, saluran air, pemandian umum, kakus, rumah potong hewan dan gudang pasar.

Daftar Pustaka

Arsip:

Decentralisatie Verslag 1912-1913
Staatsblad van Nederlandsch-Indie
No.149 Tahun 1906

Buku dan Artikel

- E. C Neyndorff, *Het Gemeentelijk Pasarbedrijf te Soerabaia 1915-1938*, dalam *Locale Techniek* No.2.
- F.W.M. Kerchman. 1930. *25 Jaren decentralitatie in Nederlandsch-Indie 1905 - 1930*,

Semarang: Vereeniging voor
Locale Belangen.

G.H. von Faber, Nieuw Soerabaia. 1936.
*De Geschiedenis Van Indie's
Voornaamste Koopstad In De
Eerste Kwarteeuw Sedert Hare
Instelling, 1906 - 1931*,
Surabaia: Van Ingen.

Purnawan Basundoro, 2009. *Dua Kota
Tiga Zaman : Surabaya dan
Malang Sejak Kolonial Sampai
Kemerdekaan*, Yogyakarta :
Ombak.

-----, 2012. *Sejarah
Pemerintah Kota Surabaya:
Sejak Masa Kolonial Sampai
Massa Reformasi*, Surabaya:

Elmaterra publishing.

-----, 2013. *Merebut Ruang
Kota: Aksi Rakyat Miskin Kota
Surabaya 1900- 1960an*.
Serpong: Marjin Kiri.

Rintoko, 2012. *Seri Sejarah Soerabaja:
s t u d i d o k u m e n t a s i
perkembangan teritorial
Surabaya 1850-1960*. Surabaya:
UNESA.

Sutjipto, F. A., 1970. "Pengaruh
*Onderneming Tebu pada
Kehidupan Desa di J a w a
Abad ke-19*", pada Seminar
Sejarah Nasional II, 26-29
Agustus Y o g y a k a r t a
,1970.